

Optimalisasi Peran Dan Fungsi BUMDes Astaguna Dalam Pengembangan Ekonomi Masyarakat Desa Trihanggo

Juhari Sasmito Aji^{1*}, Dian Retnaningdiah², Kemala Hayati³

^{1,3}Ilmu Pemerintahan, ²Manajemen

^{1,3}Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, ²Fakultas Ekonomi, Ilmu Sosial dan Humaniora

^{1,3}Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, ²Universitas Aisyiyah Yogyakarta

e-mail: ¹juhariummy@gmail.com ^{*}(corresponding author)

Abstrak

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki potensi unggul di berbagai desa yang ditandai dengan terbentuknya lembaga ekonomi BUMDes yang harus dikembangkan. Mitra Program Kemitraan Masyarakat (PKM) ini adalah BUMDes Astaguna yang berada di Desa Trihanggo. Bidang dan tata kelola yang ada dikelompok ini belum mampu mewujudkan tujuan yang diharapkan termasuk sektor perekonomian. Hal tersebut dilatarbelakangi dengan permasalahan yang dihadapi mitra yakni minimnya kualitas sumberdaya manusia yang tidak memiliki pengetahuan (*intangibile*) yang cakap terkait pengelolaan BUMDes, rendahnya bidang manajemen unit usaha ditunjukkan dengan tidak adanya keselarasan identifikasi potensi, dan tidak adanya penerapan teknologi informasi komunikasi pada bidang pemasaran. Tujuan kegiatan diupayakan untuk mencapai perbaikan di bidang sumberdaya manusia, manajemen unit usaha, dan penerapan teknologi informasi dan komunikasi. Solusi yang ingin dicapai yakni menerapkan tata kelola yang baik sesuai dengan prinsip *good governance* dengan kesiapan kualitas sumberdaya manusia yang optimal dan cakap terkait pengetahuan pengelolaan sehingga menjadi jelas terkait tugas pokok fungsi dan koordinasi kerja internal badan. Manajemen unit usaha dengan mewujudkan unit usaha baru sesuai analisis potensi dan asset desa disertai pelibatan masyarakat. Penerapan teknologi informasi komunikasi untuk mendukung produktifitas program dan kegiatan yang meliputi bidang administrasi dan bidang pemasaran guna menunjang sumberdaya manusia agar mencapai melek teknologi.

Kata kunci: BUMDes; ekonomi; *good governance*; masyarakat desa; pemberdayaan

Abstract

The Province of the Special Region of Yogyakarta has excellent potential in various villages which is marked by the formation of BUMDes economic institutions that must be developed. The partner of this Community Partnership Program (PKM) is the Astaguna BUMDes located in Trihanggo Village. The fields and governance in this group have not been able to realize the expected goals, including the economic sector. This is motivated by the problems faced by partners, namely: the minimum the quality of human resources who do not have competent (intangibile) knowledge related to the management of BUMDes, the low level of business unit management is indicated by the lack of alignment of potential identification, and the absence of application of information and communication technology in the marketing field. PKM aims to achieve improvements in the fields of human resources, business unit management, and the application of information and communication technology. The solution to be achieved is to implement good governance in accordance with the principles of good governance with the readiness of optimal and competent quality human resources related to management knowledge so that it becomes clear regarding the main tasks of the function and coordination of the agency's internal work. Management of business units by creating new business units according to the analysis of village potential and assets accompanied by community involvement. Application of information and communication technology to support the productivity of programs and activities that include the fields of administration and marketing in order to support human resources in order to achieve technology literacy. The method of activity is carried out through 1) Socialization and Assistance for BUMDes Management which includes providing literacy or knowledge related to good and appropriate governance, then there is assistance in improving governance 2) Business Unit Planning Assistance includes the preparation of business unit plans from the preparation stage to evaluation. 3) Training on the use of Information and Communication Technology includes training on the use of ICT and integration of social media management. The output targets to be achieved are the publication of the results of this service in national journals with ISSN, publications on social and print media, videos of programs and activities accompanied by the level of partner empowerment. Increased partner empowerment is shown by increasing understanding of the overall education and training program as well as active participation in participating in all activities.

Keywords: BUMDes; economy; *empowermentgood governance*; village community

I. PENDAHULUAN

Secara komprehensif hakikat desa memiliki perbedaan dari kekentalan budaya dan adat maupun potensi desa yang beranekaragam [1][2][3]. Hal ini merupakan bentuk dari kondisi multikultural bangsa Indonesia, sehingga regulasi tata kelola desa tidak perlu diseragamkan [4][5][6]. Fenomena tersebut di latarbelakangi dengan lahirnya otonomi desa dengan dasar hukum Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 B mengenai kesatuan masyarakat hukum (desa) untuk menyelenggarakan pemerintahannya sesuai otonomi yang mereka miliki. Maka dalam hal ini, tata kelola pemerintahan desa sebagai daerah asli yang memiliki keistimewaan dan hak yang mengimplementasikan otonomi desa menjadi kajian strategis, karena Indonesia merupakan negara agraris yang sebagian besar memiliki potensi di wilayah pedesaan [7][8][9]. Oleh karena itu desa diberi otoritas untuk andil dalam penyelenggaraan pembangunan khususnya peluang dalam pembentukan BUMDes sebagai instrumen otonomi desa dalam rangka penguatan ekonomi desa serta peningkatan taraf hidup masyarakat desa [10].

BUMDes merupakan wujud dari pengelolaan produktif yang dilakukan secara kooperatif, partisipatif, transparansi, akuntabel, dan sustainable serta memberi pengaruh pada bidang ekonomi khususnya perubahan kondisi perekonomian masyarakat dan peningkatan Pendapatan Asli Desa (PAD) [10][11]. Untuk mencapai tujuan BUMDes diperlukan pembentukan unit usaha sesuai analisis keselarasan kebutuhan masyarakat desa dan potensi desa, sehingga tidak menduplikasi program kerja desa lain [12][13]. Pada pembentukan BUMDes ini telah terealisasi di berbagai desa khususnya Desa Trihanggo yang memiliki lembaga ekonomi desa yakni BUMDes Astaguna yang secara geografis terletak di Desa Trihanggo, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, dengan unit usaha Pasar Dusun sebagai wadah masyarakat desa untuk mengembang

aktivitas ekonomi. Namun demikian, tidak semua BUMDes yang terbentuk memiliki peran dan fungsi yang optimal [14]. Banyak diantaranya yang masih membutuhkan pendampingan agar mampu mencapai tujuan BUMDes yang sesuai dengan prakarsa masyarakat desa. Hal ini juga terjadi pada BUMDes Astaguna yang belum mencapai peran dan fungsi dalam mengembangkan perekonomian desa.

Pada pengembangan BUMDes tersebut perlunya kualitas sumberdaya manusia untuk menunjang manajemen pengelolaan BUMDes dari sistem perencanaan hingga evaluasi [15]. Hal ini juga berkaitan dengan pembentukan unit usaha guna mencapai optimalisasi peran dan fungsi BUMDes khususnya tujuan yang telah disepakati bersama. Namun demikian, berdasarkan temuan awal BUMDes Astaguna secara komprehensif belum memiliki kualitas SDM yang baik khususnya dari aspek pemahaman mengenai pengelolaan BUMDes, tentu hal ini sangat memengaruhi operasional manajemen BUMDes. Karena pada hakikanya kualitas SDM menjadi akar tercapainya suatu tujuan [16]. Selain itu SDM juga berkaitan dengan manajemen yang terintegrasi kerja sama antar pengurus yang membentuk satu kesatuan saling melengkapi sebagaimana sistem yang berkaitan dengan komponen satu dengan yang lain [17]. Secara langsung hal ini akan memberi dampak pada tahap perencanaan hingga evaluasi dan aturan main tugas pokok fungsi. Fenomena ini menjadi jelas bahwa pada pembentukan unit usaha BUMDes Astaguna belum berjalan secara optimal serta dampak.

Permasalahan lain juga terjadi bahwa BUMDes belum mengimplementasikan teknologi informasi dan komunikasi untuk tata kelola pada bidang pemasaran. Hal ini menunjukkan bahwa BUMDes Astaguna belum mencapai prinsip transparansi, efektifitas, dan efisiensi. Maka ditemukan benang merah permasalahan BUMDes yakni minimnya kualitas SDM pengurus BUMDes mengenai tata

kelola yang baik dan ideal sehingga memberi dampak pada permasalahan lain yakni manajemen pengelolaan BUMDes, manajemen unit usaha, dan penerapan teknologi informasi komunikasi, akibatnya perkembangan BUMDes menjadi stagnan dan tidak mencapai tujuan meningkatkan keuangan desa dan ekonomi masyarakat desa.

II. SUMBER INSPIRASI

BUMDes Astaguna berawal dari tindak lanjut Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014 Pasal 87 sebagai payung hukum BUMDes dimaksudkan untuk mendorong peningkatan ekonomi produktif rakyat desa, sebagaimana posisi BUMDes yang strategis untuk mengoptimalkan pelaksanaan pemberdayaan potensi desa dalam andil kontribusi pembangunan skala nasional. Sebab, desa menjadi ujung tombak identifikasi masalah kebutuhan masyarakat di level akar rumput hingga perencanaan dan realisasi tujuan negara. Dalam hal ini Kalurahan Trihanggo mengadakan musyawarah desa yang diselenggarakan pada Hari Jum'at 26 Januari 2016 dengan melibatkan Pemerintah desa, BPD, dan Masyarakat desa yang menyepakati dibentuknya BUMDes dengan nama BUMDes Astaguna.

Berdasarkan dengan karakteristik perkembangan BUMDes, Astaguna termasuk dalam kategori tumbuh (*growth*). Hal ini disebabkan dengan temuan masalah yang dihadapi BUMDes yakni Kualitas Sumber daya manusia, yang masih rendah tercermin pada tata kelola yang masih rancu dari aspek kelembagaan. Tidak adanya aturan main terhadap tugas pokok fungsi secara jelas dan pengelolaan administrasi lain meliputi rekapitulasi laba rugi, kajian

pengelolaan usaha, strategi pengembangan dan rancangan anggaran rumah tangga. Akibatnya, produktivitas BUMDes tidak berkembang dan dominan stagnan.

Lemahnya manajemen unit usaha, kelemahan ini ditandai tidak adanya identifikasi potensi desa yang meliputi aset sumber daya alam, aset fisik atau infrastruktur yang ada, aset sosial budaya. Kemudian, tidak adanya pengembangan dalam membangun jaringan dari pihak akademisi, swasta, lembaga swadaya masyarakat, maupun media. Selain itu pada perencanaan unit usaha tidak melibatkan masyarakat desa secara merata. Tidak adanya penerapan teknologi informasi dan komunikasi, pada point ini BUMDes tidak 100% memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk menunjang efektifitas dan efisiensi administrasi, khususnya pengiriman surat yang masih manual, tidak memanfaatkan surat elektronik. Kemudian mitra belum memanfaatkan internet guna mempublikasi seputar profil, program dan kegiatan pada platform website dan media sosial.

III. METODE KEGIATAN

Pelaksanaan program dilangsungkan di Desa Trihanggo yang terletak di kecamatan Gamping, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan wilayah yang strategis karena dikelilingi perlintasan Jalan Magelang, Jalan Godean, dan perlintasan lingkaran barat. Setiap tahap pelaksanaan pengabdian ini melibatkan mitra, masyarakat desa, dan pemerintah desa yang siap berpartisipasi sampai pada tahap evaluasi. Berikut ini merupakan tahap pelaksanaan yang ditawarkan, dalam mengatasi permasalahan mitra.

1. Sosialisasi Pendampingan Pengelolaan BUMDes

Kegiatan sosialisasi pendampingan pengelolaan BUMDes, diawali dengan pengisian pre-test untuk mengetahui ukuran kemampuan audience dan memberikan materi yang dibutuhkan sebagaimana hasil pre-test. Pada kegiatan ini dimaksudkan meningkatkan kapasitas pengetahuan mitra mengenai tata kelola BUMDes yang ideal dan upaya dalam mencapai kualitas sumberdaya manusia. Pelaksanaan sosialisasi akan dijelaskan secara teoritis mengenai pentingnya pemahaman pengelolaan BUMDes, setelah itu akan dilaksanakan pendampingan mengenai perbaikan tata kelola BUMDes.

2. Pelatihan dan Pendampingan Perencanaan Unit Usaha

Kegiatan ini mengenai pendampingan perencanaan unit usaha melalui identifikasi potensi desa yang melibatkan mitra, masyarakat desa, pemerintah desa, dan akademisi (tim pengabdian). Pendampingan perencanaan unit usaha diawali melalui forum musyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama. Pendampingan perencanaan unit usaha yakni wahana *outbond* wisata air, yang kemudian membuat rencana analisis keuangan dan pengembalian modal usaha, membuat gambaran pengembangan dan arah bisnis, serta analisis resiko.

3. Pelatihan dan Pendampingan Teknologi Informasi dan Komunikasi pada Bidang Pemasaran

Kegiatan pelatihan akses media sosial instagram, facebook, dan youtube untuk mempublikasi kegiatan BUMDes. Kegiatan publikasi ini diharapkan dapat menjadi strategi pemasaran BUMDes yakni pengenalan unit usaha kepada khalayak.

IV. KARYA UTAMA

Pelatihan dan pendampingan bisnis plan berupa pemenuhan kapasitas pengetahuan mengenai tahap perencanaan bisnis sebagai karya utama kegiatan. Hal

tersebut, menjadi solusi dalam menentukan unit usaha baru yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan masyarakat desa guna mendorong optimalisasi peran dan fungsi BUMDes di bidang sosial dan ekonomi.

Pelaksanaan yang diimplementasikan kepada mitra yakni mengenai sistem perencanaan unit usaha, yang dikelola secara bersama dengan melibatkan multi pihak (pemerintah desa, masyarakat desa, akademisi dan media) dengan penyelenggaraan musyawarah, survei lokasi unit usaha, dan penyusunan rencana analisis kebutuhan keuangan dengan membandingkan pengembalian modal usaha yang akan diperoleh, disertai analisis gambaran pengembangan dan arah bisnis, untuk mengetahui analisis resiko unit usaha.

V. ULASAN KARYA

Pada ulasan karya utama didapati analisis unit usaha baru sebagai pendomprak perekonomian desa. akan tetapi dalam upaya menciptakannya diperlukan pembaharuan sumberdaya manusia sebagai fondasi keberhasilan BUMDes. Hal ini berkaitan dengan dinamika pengelolaan BUMDes, jika kapasitas sumberdaya manusia ideal maka dapat menciptakan kinerja yang baik. Pada pelaksanaan sosialisasi dilangsungkan kegiatan semi diskusi untuk merencanakan inovasi produk baru dan unit usaha. Pada sesi kegiatan sosialisasi juga dimaksudkan agar memperoleh kesepakatan bersama dari pihak BUMDes dan tim pengabdian. Berlangsungnya sosialisasi terdapat pembahasan berikut ini.

1) Sosialisasi pendampingan pengelolaan BUMDes, dilaksanakan dengan memberikan uraian materi terkait pentingnya tata kelola BUMDes sesuai dengan 6 prinsip yang meliputi kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparan, akuntabel, sustainable. Dari unsur kooperatif diberikan paparan bahwa untuk mencapai optimalisasi peran dan fungsi BUMDes diperlukan kerja sama internal dengan sesama pengelola dan eksternal dengan mitra.

Pada unsur partisipatif terdapat upaya dalam memberikan kesadaran masyarakat desa dan pengelola bahwa diperlukan adanya peran yang kolaboratif untuk membangun pembangunan ekonomi desa. lebih lanjut pada unsur akuntabel berkaitan dengan penerapan teknologi informasi untuk memberikan akses jangkauan kepada masyarakat agar memberikan andil dalam monitoring pengelolaan BUMDes. Akuntabel dimaksudkan untuk memberikan arahan dalam laporan setiap tugas pokok fungsi secara berkala, serta sustainable yang memberikan pelayanan secara merata tanpa memandang bulu.

Pada kegiatan sosialisasi didapatkan output peningkatan pemahaman yang ditunjukkan dari keaktifan audience dalam tanya-jawab dan diskusi. Kemudian dengan adanya sosialisasi yang telah terlaksana, pengelola BUMDes memiliki inisiasi untuk menciptakan unit usaha baru, dengan mengupayakan penerapan unsur kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparan, akuntabel, dan *sustainable*.

2) Perencanaan bisnis unit usaha outbond wisata air melibatkan tokoh masyarakat dan pengelola BUMDes untuk menggali aspirasi, menemukan analisis potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia, serta menemukan kebutuhan masyarakat desa. Oleh karena itu, forum ini diciptakan secara informal untuk memberikan suasana nyaman agar masyarakat desa mampu menuangkan pikiran melalui diskusi yang menghasilkan rencana desain arena outbond BUMDes Astaguna dengan membangun arena outbond untuk memberikan daya tarik konsumen khususnya anak-anak. Lokasi outbond berada di Dusun Baturan, Desa Trihanggo dengan memanfaatkan lahan tanah kosong dan aliran Selokan Mataram sehingga dibentuk adanya arena bermain anak dari kolam ikan, arena menangkap ikan, taman bermain dan *foodcourt*. Pemilihan unit usaha outbond tersebut dimaksudkan untuk pengenalan lingkungan

alam terbuka, sehingga meningkatkan keberanian anak, menumbuhkan pola pikir kreatif, dan belajar untuk bekerjasama. Di samping itu, unit usaha outbond wisata air diprioritaskan untuk membuka lapangan kerja bagi masyarakat desa.

Kebutuhan membangun mitra dan koneksi untuk memberikan keuntungan kedua belah pihak seperti halnya simbiosis mutualisme sehingga memberikan kontribusi sesuai bidang masing-masing. Berdasarkan temuan awal didapatkan kurangnya keterlibatan mitra dalam andil pembangunan unit usaha atau pengelolaan BUMDes. Sehingga melalui perencanaan unit usaha *outbond* diberikan fasilitas *foodcourt* untuk memberikan wadah masyarakat dalam memberikan peluang untuk menjangkau konsumen yang lebih luas, di samping itu perencanaan unit usaha *outbond* yang bisa disebut dengan kegiatan rekreasi dan kegiatan olahraga di alam terbuka dengan sasaran konsumen yang bersifat tim atau kelompok, sehingga berpotensi untuk mengajak mitra Jogja T-Shirt Jethe sebagai *iconic* toko oleh-oleh dan pabrik kaos legendaris di Kota Yogyakarta agar memberikan rute selesainya outbond untuk berbelanja pada toko tersebut. Kemudian menjalin mitra kepada pemerintah yang terkait untuk memperoleh dukungan dan pelatihan yang memberikan benefit positif bagi perkembangan *outbond*.

Pada perencanaan outbond BUMDes Astaguna memanfaatkan asset tanah Desa Trihanggo dengan wilayah yang strategis karena dikelilingi perlintasan Jalan Magelang, Jalan Godean, dan Perlintasan lingkaran barat dengan padat penduduk yang mencapai 13.433 jiwa. Padukuhan Baturan sebagai lokasi arena outbond yang dianggap paling strategis dan mudah dijangkau oleh konsumen secara lebih luas. Desain arena *outbond* BUMDes Astaguna juga terdapat identifikasi analisis potensi dan asset desa untuk menyelaraskan kegiatan *outbond* yang tepat dan memberikan daya tarik konsumen. Potensi Dusun

Baturan, Desa Trihanggo terdapat lahan tanah kosong dan aliran Selokan Mataram sehingga akan dimanfaatkan arena bermain anak dari kolam ikan, arena menangkap ikan, taman bermain dan *foodcourt*. Pemilihan unit usaha *outbond* tersebut dimaksudkan untuk pengenalan lingkungan alam terbuka, sehingga meningkatkan keberanian anak, menumbuhkan pola pikir kreatif, dan bekerjasama.

Desain arena *outbond* BUMDes Astaguna juga dilengkapi dengan permainan *outbond* dengan kompetisi perlombaan yang mengasah kemampuan untuk memperoleh manfaat *outbond*. Sehingga desain arena *outbond* terdapat kolam ikan untuk memberikan fasilitas penangkapan ikan dan permainan air untuk kompetisi perlombaan, dilengkapi gazebo sebagai tempat istirahat peserta *outbond*. Pemilihan unit usaha *outbond* secara khusus agar memberikan kegiatan berbasis edukasi dalam wujud grup atau kelompok, sehingga dapat membangun kerja sama yang lebih intensif.

3) Strategi pemasaran adalah unsur paling krusial untuk meningkatkan permintaan konsumen dan memperkenalkan brand secara luas. Dalam strategi pemasaran, BUMDes Astaguna diharapkan untuk mengimplementasikan strategy 4P (*Product, Price, Promotion, and Place*). Dalam hal ini *product* diperlukan adanya upaya peningkatan kualitas dan memberikan daya tarik konsumen guna memenangkan persaingan bisnis dari kompetitor yang memiliki kecenderungan produk serupa, sehingga diperlukan analisis peluang pasar untuk memberikan keselarasan yang tepat terhadap produk yang akan dikembangkan. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan produk adalah objek wisata *outbond* (*out of bondarries*) wisata air yang memiliki inovasi dalam arena bermain dengan memberikan rintangan-rintangan sebagai ajang perlombaan peserta, selain itu juga dapat mengenal jenis-jenis ikan. Pada *outbond* tersebut juga terdapat *foodcourt* atau taman kuliner yang disediakan untuk masyarakat Desa

Trihanggo yang memiliki UMKM agar menjangkau konsumen yang lebih luas lagi. Pada unsur *price* dimaksudkan untuk memberikan kemampuan dalam menentukan harga dalam berkegiatan *outbond* tersebut. Unsur *price* menjadi penting dalam strategi pemasaran karena memengaruhi permintaan penjualan di pasar dan memperbaiki *market share* serta stabilitas harga untuk mencapai target laba. Secara jelas penentuan harga terdapat beberapa faktor biaya, keuntungan, dan *competitor*.

Promotion berkaitan dengan tindakan memberikan informasi seputar produk atau unit usaha yang memiliki spesifikasi fokus kebermanfaatannya yang diperoleh konsumen. Bentuk promosi BUMDes Astaguna berupa *public relation*, publikasi *media social* atau cetak dengan mengimplementasikan pemanfaatan TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi). BUMDes Astaguna telah menerapkan promosi melalui *public relation* dan *media social* *Instagram/facebook*. Unsur *place* adalah tempat para konsumen untuk memperoleh produk, sehingga diperlukan kajian lokasi yang lebih strategis untuk setiap unit usaha BUMDes sehingga mudah dijangkau konsumen.

VI. KESIMPULAN

Sosialisasi pendampingan dan pengelolaan BUMDes mengenai pentingnya penerapan prinsip tata kelola BUMDes yang ideal, dengan dirumuskan mengenai penetapan perencanaan bisnis dan strategi pemasaran, dilanjutkan pelatihan dan pendampingan pembuatan perencanaan bisnis untuk memberikan arah dalam menciptakan unit usaha baru khususnya *outbond* wisata air. Setelah pelatihan dan pendampingan implementasi teknologi informasi dan komunikasi melalui social media. Pada perencanaan dicantumkan adanya pelatihan dan pendampingan implementasi TIK dalam bidang administrasi, namun pengelola BUMDes telah mampu mengoperasikan TIK untuk pengelolaan keuangan dan lainnya.

VII. DAMPAK DAN MANFAAT KEGIATAN

Dampak dan manfaat kegiatan secara jelas terdapat pada perolehan pemahaman yang meningkat dari sebelumnya mengenai prinsip tata kelola, menciptakan unit usaha baru disertai analisis perencanaan strategi pemasaran. Hal ini dibuktikan dengan tahap evaluasi melalui pengisian *post-test* dinilai meningkat dari pentingnya kualitas SDM (40%-80%). Pengusulan unit usaha baru (35%-70%), dan upaya pembaharuan strategi pemasaran (45%-75%). Pada dampak tersebut diharapkan membepeningkatan pendapatan BUMDes dan memberikan realisasi yang sesuai dengan visi

dan misi BUMDes. Pengabdian harus memahami sumber daya manusia diartikan sebagai sumber kekuatan yang berasal dari manusia yang didayagunakan oleh badan atau organisasi. Pendapat tersebut relevan fondasi keberhasilan bahwa agar menjadi sebuah kekuatan, sumber daya manusia harus memiliki kualitas dan kompetensi ideal [18]. Dalam hal ini sumber daya manusia juga menjadi instrument untuk menciptakan penerapan 6 prinsip tata kelola, sehingga berkaitan dengan keberhasilan pembentukan unit usaha yang dibutuhkan serta memberikan analisis strategi pemasaran yang tepat bagi BUMDes Astaguna (Tabel 1).

Tabel 1. Perbandingan Dampak Pengabdian

Indikator Pengabdian	Sebelum	Sesudah	Keterangan
Pemahaman pentingnya kualitas sumber daya manusia	Tidak Paham	Meningkat	Pengelola dapat memaparkan pentingnya sumber daya manusia sebagai akar tata kelola BUMDes
Organisasi adalah wadah untuk mencapai tujuan bersama	Terbatas	Meningkat	Pengelola mampu memahami hakikat kooperatif
Optimalisasi unit usaha menjaditindakan solusi ekonomi desa	Tidak Paham	Meningkat	Pengelola mampu memahami kesesuaian potensi, asset, kebutuhan masyarakat untuk menciptakan unit usaha
Unit usaha memerlukan inovasi	Terbatas	Meningkat	Pengelola dapat memberikan pemikiran dan pendapat mengenai terobosan baru unit usaha
Bidang administrasi diperlukan pembaharuan melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Terbatas	Meningkat	Pengelola memahami proses administrasi dilaksanakan menjadi lebih efisien dengan menggunakan TIK
Strategi Pemasaran berbasis <i>go digital</i> menjadi urgensi pembaharuan di masa pandemic Covid-19	Terbatas	Meningkat	Pengelola mampu menerapkan bidang pemasaran pada media sosial
Mediasosial memainkan peran penting di era digital untuk eksistensi organisasi	Terbatas	Meningkat	Pengelola mampu mengupayakan pemasaran melalui media social

VIII. DAFTAR PUSTAKA

- [1] Luthfia, A.R. 2013. Menilik Urgensi Desa Di Era Otonomi Daerah. *Jurnal Rural dan Development*, 4(2):135-143.
- [2] Maharani, R. 2018. *Kajian Lanskap Budaya Masyarakat Osing di Kabupaten Banyuwangi*. Skripsi Departemen Arsitektur Lanskap. IPB. Bogor.
- [3] Hakeu, F dan Sunarti, S. 2020. Impelementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Kab. Gorontalo Utara terhadap Wisata Budaya Ritual Mandi Safar. *Jurnal Ilmu Pariwisata*, 2(2):97-113.
- [4] Firmansyah, A.A. 2020. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Desa Bagi Aparat Desa Sidosari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan. *Jurnal Pengabdian Dharma Wacana*, 1(2):59-66.

- [5] Abustun, A. 2019. Implementasi Percepatan Pembangunan Desa Dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Jurnal Gagasan Hukum*, 1(2):216-227.
- [6] Maschab, M. 2013. Politik Pemerintahan Desa di Indonesia. *Parlindungan Penerbit PolGov*.
- [7] Suratha, I.K. 2015. Krisis Petani Berdampak pada Ketahanan Pangan di Indonesia. *Media Komunikasi Geografi*, 16(1):67-80.
- [8] Ayun, Q.K. 2020. Perkembangan Konversi Lahan Pertanian di Bagian Negara Agraris. *Jurnal Ilmu Pertanian Tropika dan Subtropika*, 5(2):38-44.
- [9] Aziz, N.L.L. 2016. Otonomi Desa dan Efektivitas Dana Desa. *Jurnal Penelitian Politik*, 13(2):193-211.
- [10] Eko, S., Khasanah, T.I., Widuri, D., Handayani, S., Handayani, N., Qomariyah, P., Aksa, S., Hastowiyono, Suharyanto, Kurniawan, B. 2014. Desa Membangun Indonesia. *Forum Pengembangan Pembaharuan Desa*.
- [11] Senjani, Y.P. 2019. Peran Sistem Manajemen pada Bumdes dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1):23-40.
- [12] Pradana, H.A dan Fitriyanti, S. 2019. Pemberdayaan Dan Percepatan Perkembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Peningkatan Ekonomi Masyarakat Dan Peningkatan Pendapatan Asli Desa. *Jurnal Kebijakan Pembangunan. Jurnal Kebijakan Pembangunan*, 14(2):133-146.
- [13] Alkaff, A. 2016. Revitalisasi BUMDes dalam Upaya Meningkatkan Kemandirian dan Penanggulangan Kerentanan Kemiskinan Masyarakat Desa di Kabupaten Jember. *Jurnal Paradigma Madani*, 3(2):33-44.
- [14] Arindhawati, A.T dan Utami, E.R. 2020. Dampak Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (Studi pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Ponggok , Tlogo , Ceper dan. 4(1):43-55.
- [15] Yuniati, S., Susilo, D., dan Albayumi, F. 2017. Penguatan Kelembagaan Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Petani Tebu. *Jember 27-28 Oktober 2017. Unej-E Proceeding. ISBN 978-602-5617-01-0. Halaman 498-505.*
- [16] Halimah, F. 2017. Studi Deskriptif Penerapan Program Nawacita Presiden Joko Widodo tentang Membangun Indonesia dari Pinggiran terhadap Kesejahteraan Warga di Desa Kanoman Kecamatan Panjatan Kabupaten Kulon Progo. *Repository Universitas PGRI Yogyakarta. Halaman 1-15.*
- [17] Raharso, S. 2011. Kepercayaan Dalam Tim. *Kepercayaan Dalam Tim. Jurnal manajerial*, 417(2), 42–53.
- [18] Sutrisno, E. 2011. Manajemen Sumber Daya Manusia. *Kencana Prenada Media Group. Jakarta.*

IX. UCAPAN TERIMA KASIH

Diucapkan terima kasih kepada lembaga pengabdian Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang telah memberikan wadah pengabdian melalui dukungan pendanaan dan ruang untuk mengupayakan penanganan solutif bagi kelompok mitra.